

*Jurnal Ilmu Sosial*  
**Mamangan**  
Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat

Jurnal Ilmu Sosial Mamangan  
Volume 6, Nomor 1, Januari-Juni 2017

---

Dinamika Keberlangsungan Kelompok Pengusul HKm Sepakat, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah

Penulis : Risna Novita Amalia & Suraya Abdulwahab Afiff

Sumber : Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume 6, Nomor 1, Januari-Juni 2017

Diterbitkan Oleh : Laboratorium Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Sumatera Barat

**Untuk Mengutip Artikel ini :**

Amalia, Risna Novita & Suraya Abdulwahab Afiff, 2017. *Dinamika Keberlangsungan Kelompok Pengusul HKm Sepakat, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah*. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume 6, Nomor 1, Januari-Juni 2017: 1-10.

Copyright © 2017, Jurnal Ilmu Sosial Mamangan  
ISSN : 2301-8496 (*Print*), ISSN : 2503-1570 (*Online*)

Laboratorium Pendidikan Sosiologi  
STKIP PGRI Sumatera Barat



## Dinamika Keberlangsungan Kelompok Pengusul HKm Sepakat, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah

Risna Novita Amalia<sup>1</sup> & Suraya Abdulwahab Afiff<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana Antropologi, Fakultas ilmu Sosial dan ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok  
Email : [neng.nanarisma@gmail.com](mailto:neng.nanarisma@gmail.com)

<sup>2</sup>Departemen Antropologi, Fakultas ilmu Sosial dan ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok  
Email : [safiff@gmail.com](mailto:safiff@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to gain an understanding on a process by which a group can survive. This research applies qualitative and ethnographic methods in the form of case study of one community group in Central Kalimantan that was formed to obtain social forestry permit with Hutan Kemasyarakatan scheme. This study traces internal and external dynamics that contribute significantly to the group's ability to survive, despite the challenge of this group to gain support from local government. The results show that a number of factors play an important role in maintaining the existence of groups such as the role of the group leader, the motivation and meaning of the group for the members, and how the actors outside the group such as non-governmental organizations and related government agencies concerned with the existence of the group. Authors hope that the results of this study can improve the understanding of interested parties to support community institutions in forest management.*

**Keywords:** *Hutan Kemasyarakatan, Central Kalimantan, Social Forestry.*

### ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang proses yang membuat suatu kelompok dapat terus bertahan. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dan etnografi ini mengangkat studi kasus satu kelompok masyarakat di Kalimantan Tengah yang dibentuk untuk memperoleh ijin perhutanan sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan. Penelitian ini menelusuri dinamika internal dan eksternal yang berkontribusi nyata pada kemampuan kelompok untuk dapat bertahan, terlepas dari kenyataan tantangan kelompok ini untuk memperoleh dukungan dari pemerintah daerah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah faktor berperan penting untuk mempertahankan keberadaan kelompok seperti peran dari ketua kelompok, motivasi dan makna kelompok bagi anggota, serta bagaimana aktor-aktor di luar kelompok seperti lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pemerintah terkait yang berkepentingan dengan keberadaan kelompok. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman pihak-pihak yang tertarik untuk mendukung kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

**Kata Kunci:** *Hutan Kemasyarakatan, Kalimantan Tengah, Perhutanan Sosial.*

## **PENDAHULUAN**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertemuan penulis dengan Yayasan Yayorin (Yayasan Orang Utan Indonesia) yang berkantor di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah pada bulan November 2014. Yayasan merupakan LSM yang memusatkan kegiatannya pada pendidikan lingkungan dan peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan konservasi. Ketika penulis datang di bulan November 2014, ternyata salah satu kegiatan Yayasan pada waktu itu adalah mendampingi sejumlah kelompok masyarakat yang tinggal berbatasan dengan Suaka Margasatwa (SM) Lamandau. Yayasan dan masyarakat yang tinggal berbatasan dengan SM Lamandau membentuk kelompok-kelompok pengusul Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang berada di tiga desa penyangga SM Lamandau yaitu Kelurahan Mendawai, Desa Tanjung Putri, dan Desa Tanjung Terantang. Salah satu kelompok pengusul HKm yang dibentuk Yayasan adalah Kelompok Pengusul HKm Sepakat yang berada di Desa Tanjung Putri.

Pengajuan HKm yang dilakukan pada awal tahun 2012 ternyata tidak berjalan mulus. Sampai tahun 2016, kelompok-kelompok HKm yang diinisiasi oleh Yayasan belum mendapatkan rekomendasi dari Bupati Kotawaringin Barat. Dalam masa empat tahun menunggu surat rekomendasi dari Bupati Kotawaringin Barat, kelompok-kelompok pengusul HKm yang didampingi oleh Yayasan satu per satu mulai tidak aktif, hanya ada satu kelompok yang masih tetap eksis, yaitu Kelompok Pengusul HKm Sepakat.

Penulis tertarik meneliti Kelompok pengusul HKm Sepakat dikarenakan beberapa alasan. Alasan pertama, terkait dengan konteks mengapa Yayasan bersama masyarakat di sekitar kawasan SM Lamandau membentuk kelompok pengusul HKm. Selama penulis melakukan penelitian pada kelompok pengusul HKm Sepakat, ternyata persoalan akses masuk kawasan SM Lamandau bukan tujuan awal pembentukan kelompok HKm tersebut. Tujuan awal pembentukan kelompok Pengusul HKm Sepakat yang tidak berkaitan dengan persoalan akses, membuat kelompok pengusul HKm ini berbeda dengan beberapa studi kasus mengenai kelompok-kelompok pengusul HKm yang pernah penulis pelajari

(Limberg, Iwan, Wollenberg, & Moeliono, 2006; Purwoko, 2002; Sunarni, 2011). Di sini muncul pertanyaan, apa alasan Yayasan dan kelompok masyarakat di desa-desa sekitar SM Lamandau untuk mengajukan izin HKm. Alasan kedua, di sebagian besar program HKm dalam kasus-kasus lain diasumsikan bahwa masyarakat yang mengajukan izin HKm adalah mereka yang penghidupannya tergantung pada kawasan hutan yang diusulkan dalam program HKm. Dalam konteks Kelompok pengusul HKm Sepakat, ternyata anggota kelompok saat ini sebagian besar penghidupannya tidak bergantung pada kawasan hutan yang diusulkan dalam program HKm. Disini muncul pertanyaan mengenai alasan yang mendasari para anggota untuk tetap mempertahankan kelompok pengusul HKm ini.

Kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa dari total tujuh kelompok pengusul HKm yang difasilitasi oleh Yayasan, hanya Kelompok pengusul HKm Sepakat yang masih tetap eksis hingga saat ini. Suatu institusi tidak mungkin tetap bertahan tanpa dukungan anggotanya. Hal ini hanya mungkin dimengerti apabila kita dapat memahami apa makna institusi dari perspektif para pihak yang mendukungnya. Selain dukungan anggota, menjadi penting untuk memahami siapa saja pihak-pihak kunci di luar kelompok baik dari lembaga swadaya masyarakat maupun pemerintah yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman bagaimana kelompok pengusul HKm Sepakat dapat terus bertahan terlepas dari kenyataan sulitnya mereka mendapat dukungan dari pemerintah daerah setempat. Untuk memahami kemampuan kelompok pengusul HKm Sepakat agar dapat tetap eksis, maka penelitian ini fokus pada dua pertanyaan kunci sebagai berikut: Bagaimana dinamika internal keanggotaan berkontribusi dalam keberlangsungan Kelompok pengusul HKm Sepakat? dan bagaimana peran dan interes dari pihak-pihak terkait baik di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemerintah dalam mendukung keberlangsungan Kelompok pengusul HKm Sepakat?

Uraian dinamika internal dan dukungan pihak terkait dalam kontribusinya pada keberlangsungan Kelompok pengusul HKm

Sepakat diawali dengan memahami konteks pembentukan kelompok dan perkembangan kelompok yang menggambarkan motivasi dan strategi para aktor dalam mempertahankan kelompok ini. Dalam hal ini pihak luar seperti LSM dan pemerintah adalah faktor yang juga penting diperhatikan tentang bagaimana perannya dalam mendukung atau menghambat keberlangsungan kelompok masyarakat.

Penulis berharap bahwa pembaca yang tertarik dalam kajian kelompok atau institusi dapat memetik manfaat dari penelitian ini dalam memahami dinamika internal dan peran LSM dan pemerintah dalam keberlangsungan sebuah kelompok. Selain itu penulis berharap pembaca dapat mengambil manfaat dan menambah wawasan di bidang dinamika institusi melalui pendekatan etnografis. Selain itu, penulis juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi LSM dalam strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk dapat mempertahankan sebuah kelompok. Akhirnya, penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi untuk melihat peran pemerintah dalam mendukung atau menghambat keberlangsungan sebuah kelompok.

Dalam melihat bagaimana sebuah kelompok dapat bertahan, penulis menggunakan pendekatan *theory of practice*. *Theory of practice* berguna dalam melihat tindakan (*what people do*) para aktor. Selain itu, kerangka ini juga menekankan konteks atau latar dimana tindakan tersebut terjadi. *Theory of practice* melihat sesuatu melalui tindakan (*what people do*) dalam hubungannya dengan materi dan dinamika kuasa (Rankin, 2003). Proses dianggap sebagai bentuk kata sifat dari kata benda yang memandang sebuah fenomena dengan penekanan pada "tindakan terus menerus, operasi, atau serangkaian perubahan yang terjadi..." (Swartz, 1969). Dalam melihat tindakan atau praktik-praktik yang dilakukan oleh agen, signifikansi lokasi-lokasi kejadian sangat penting. Pembahasan tentang konteks, ruang/tempat, dan waktu banyak dipelajari oleh para ahli geografi yang merupakan ilmu yang menekankan tentang *place* dan *scale*. Ilmu geografi menggambarkan bahwa *life is 'placed'*, ruang tidak netral dan memainkan peranan struktur dan dikonstruksi secara sosial (Rankin, 2003).

*Practice theory* dapat dilihat dengan tindakan para aktor dalam kehidupan mereka dan agensi menjadi salah satu konsep yang penting. Pendekatan agensi berguna bagi penulis dalam melihat peranan agen-agen yaitu anggota kelompok, LSM, dan pemerintah dalam keberlangsungan kelompok pengusul HKm Sepakat. Selain itu, hal ini berguna untuk melihat motivasi dan strategi serta bagaimana hal ini dinegosiasikan, dibatasi, atau difasilitasi oleh struktur. Beberapa definisi agensi yaitu: "*The socioculturally capacity to act* (Ahearn, 2000, 2001); "*A sense that the self is an authorized social being*" (Ortner 1996); Agensi bukanlah maksud dari tindakan tersebut, tetapi kemampuan (*ability*) orang dalam bertindak, yaitu kemampuan individu untuk terlibat dalam kejadian sebagai pelaku (Giddens, 2003, 2010). Sewell (1992) mengatakan bahwa setiap individu memiliki agensi. Menurutnya "*a capacity for agency... is inherent in all humans*" (Ahearn, 2001). Dengan demikian, agensi merupakan kemampuan aktor untuk dapat bertindak dan dimiliki oleh setiap aktor.

Ahearn menyatakan bahwa agensi tidak sama dengan kehendak bebas (Ahearn, 2000). Lebih jauh, (Ortner, 2006) menyatakan bahwa tidak ada agen yang bebas, karena individu tidak memiliki kemampuan penuh untuk mengontrol dan mengendalikan hasil akhir. Agensi setiap aktor dibatasi oleh struktur dalam kehidupan aktor tersebut. Agen dapat mempengaruhi struktur melalui tindakan yang ia lakukan dan struktur juga dapat mempengaruhi tindakan-tindakan agen. Hubungan dialektika antara struktur dan agen telah dibahas oleh Giddens dalam pendekatannya yang disebut strukturasi. Teori strukturasi Giddens memberikan peran yang sama antara agen dan struktur dalam kajian ilmu sosial. Giddens dalam pendekatan strukturasi melihat agensi sebagai sebuah proses, yaitu pembentukan dan pembentukan kembali dari formasi sosial dan budaya yang lebih besar (Ahearn, 2000).

Giddens menjelaskan aspek tindakan yang dilakukan oleh aktor dengan "model stratifikasi tindakan". Model ini menjelaskan tiga aspek tindakan yaitu kemampuan refleksif tindakan, rasionalisasi tindakan, dan motivasi tindakan. Kemampuan refleksif aktor mencakup secara rutin memonitor aspek-

aspek, baik sosial maupun fisik, dari konteks-konteks tempat di mana mereka bergerak (Giddens 2010). Rasionalisasi tindakan yaitu alasan-alasan yang dikemukakan agen dalam menjelaskan tindakannya sedangkan motivasi tindakan adalah motif dan keinginan yang mendorong munculnya tindakan itu (Lubis, 2014). Para agen atau aktor sebagai bagian tak terpisahkan dari tindakan mereka, memiliki kemampuan untuk memahami tindakan mereka saat mereka melakukannya (Giddens, 2003).

Hal ini menyiratkan beberapa hal yang terkait dengan agensi yaitu tujuan, maksud, atau intensionalitas dari tindakan dan bagaimana tindakan dilakukan (*conscious or unconscious*). Giddens menyertakan intensionalitas atau maksud dalam mendefinisikan agensi. Tetapi intensionalitas Giddens merupakan bentuk dari praktik rutin dan tidak menjelaskan bahwa aktor memiliki tujuan yang jelas. Ortner (2006) membedakan antara praktik rutin dan agensi yang lebih menekankan tindakan yang menyertakan maksud atau tujuan.

Agensi dan kuasa merupakan dua hal yang saling berhubungan. Agensi berarti seorang individu mampu menggunakan (secara terus-menerus di dalam kehidupan sehari-hari) sederet kekuasaan kausal, termasuk memengaruhi kekuasaan-kekuasaan yang dijalankan oleh orang lain (Giddens 2010). Ortner memaparkan bahwa agensi dapat berarti dua hal, yaitu agensi dalam arti "kuasa" dan agensi dalam arti "projek". Agensi dalam arti kuasa yaitu dalam poros dominasi dan resistansi, dan didefinisikan melalui istilah dominan. Dalam arti kedua didefinisikan melalui logika lokal mengenai apa yang baik dan keinginan dan bagaimana untuk mengejar hal tersebut (Ortner, 2006).

Struktur menjadi hal yang penting untuk dibahas dalam kaitannya dengan agensi. Agensi seseorang dipengaruhi dan mempengaruhi struktur sosial yang lebih besar (Ahearn, 2000). Giddens membedakan antara struktur dan sistem dengan mengartikan struktur sebagai aturan-aturan (*rules*) dan sumberdaya yang dijalankan dan dikukuhkan kembali oleh para pelaku (agen) dalam proses interaksi (Giddens, 2003, 2010). Sistem sosial adalah bentuk interaksi teratur yang terdapat dalam individu dan kelompok, sistem sosial bukanlah struktur,

namun sistem itu memiliki struktur (Giddens 2003). Artinya, sistem sosial itu terstruktur berdasarkan aturan-aturan dan sumber-sumber (Lubis, 2014). Struktur tidak boleh disamakan dengan kekangan namun meskipun demikian ia bersifat mengekang dan membolehkan. Giddens (2003) berpendapat bahwa struktur tidak hanya menghambat dan menentukan bentuk-bentuk perilaku, tetapi juga memberikan kemampuan bagi perilaku; struktur memberikan kesempatan dan pembatasan sekaligus yang disebut sebagai dualitas struktur.

Pendekatan lain yang juga penulis gunakan yaitu kepengaturan. Pendekatan kepengaturan berguna bagi penulis untuk membedah peran agen-agen Negara ataupun LSM dalam memengaruhi, membentuk, dan mendefinisikan kebijakan dan program yang berkaitan dengan lingkungan pada Kelompok pengusul HKm Sepakat. Pembentukan kelompok sepakat dikarenakan sebuah program. Dengan menggunakan konsep ini, penulis dapat menjelaskan proses-proses bagaimana program dan wacana membentuk dan membentuk kembali kelompok pengusul HKm Sepakat.

Li, mendefinisikan *governmentality* sebagai pengaturan perilaku (*conduct of conduct*), yaitu usaha untuk mengarahkan perilaku manusia (Li, 2007). Untuk mencapai tujuan, diperlukan berbagai usaha dan menggunakan cara pemaksaan tidak dapat dilakukan kepada setiap individu. Oleh karena itu, pemerintah beroperasi dengan cara mendidik keinginan dan membentuk kebiasaan, aspirasi, dan kepercayaan (Li, 2007, 2012). Walau konsep kepengaturan sudah dipakai secara luas untuk menganalisis berbagai macam kajian sosial, tetapi konsep ini juga memiliki keterbatasan. Kekurangan dan keterbatasan konsep ini adalah pengabaian terhadap realitas empiris, mengecilkkan peran pemerintah, mengabaikan perbedaan sosial, dan menempatkan teori resistensi secara tidak memadai (McKee, 2009).

McKee (2009) mengajukan dua pendekatan untuk melakukan studi kepengaturan, yaitu analisis diskursus (wacana), analisis intervensi program dan praktik melalui metode etnografi. Menurut Li (2012) penelitian etnografis dalam upaya kepengaturan akan mengombinasikan

analisis tentang intervensi kepengaturan (asal usul, diagnosis, dan resepnya, serta pembentukan arena oleh unsur-unsur yang disingkirkan dari perencanaannya) dan analisis mengenai apa yang terjadi bila intervensi tersebut bersilang sengkabut dengan proses-proses yang hendak mereka atur dan perbaiki sehingga menghasilkan campur aduk proses, praktik, dan pergulatan yang melampaui cakupan rencana semula.

Para peneliti yang menggunakan kerangka *governmentality* memfokuskan terhadap apa yang disebut sebagai program (Dean, 1999). Program adalah tujuan yang akan dicapai, bersama dengan rasionalitas yang dapat membuat hal tersebut masuk akal, dan terdiri dari strategi dan teknik. Li (2007) menganggap program sangat penting karena dapat menjelaskan praktek, proses, dan kejadian yang tidak terlihat. Sebuah etnografi terhadap upaya kepengaturan, menurut Li akan menganalisis bagaimana program terbentuk dan dibentuk, serta mempertimbangkan bagaimana program dikompromikan dan diubah untuk mengakomodasikan kegagalan dan pergulatan.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif membutuhkan ekspresi verbal dan menawarkan deskripsi yang kompleks dan mencoba untuk menjelaskan jejaring makna (Have, 2004). Dengan demikian metode kualitatif memungkinkan penulis untuk melihat proses dan aktor dalam fenomena sosial dalam bentuk narasi dan deskripsi. Metode kualitatif erat kaitannya dengan etnografi. Dalam melakukan etnografi, penulis memetakan aktor-aktor yang terlibat dalam Kelompok pengusul HKm Sepakat dan menentukan informan-informan kunci. Penulis juga *live-in* selama ± dua bulan di Desa Tanjung Putri dan kantor Yayasan. selain itu penulis melakukan wawancara, observasi-partisipasi, *focus group discussion* (FGD), dan studi literature. Aktivitas yang juga penting dalam penelitian etnografi yaitu membuat catatan lapangan. Catatan lapangan ini berisi aktivitas sehari-hari yang dialami peneliti saat berada di tengah-tengah masyarakat.

Tahap pengolahan data terdiri dari transkripsi, penyortiran data, dan pengodean data. Transkripsi yaitu mendengarkan dan menuliskan percakapan. Selanjutnya yaitu proses menyortir data dengan memilih data-data mana saja yang akan berguna dan sesuai dengan penelitian. Tahap selanjutnya pengodean data lapangan yang mencakup proses identifikasi bagian-bagian tertentu yang berkaitan dengan tema-tema tertentu (Murchison 2010). Jika semua data sudah lengkap, maka selanjutnya yaitu proses membangun model yang dikaitkan dengan teori.

## LATAR BELAKANG KELAHIRAN KELOMPOK HKm SEPAKAT

Kelompok pengusul HKm Sepakat terbentuk untuk mendapatkan izin HKm pada daerah penyangga Suaka Margasatwa (SM) Lamandau. SM Lamandau merupakan kawasan bekas tiga perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan pada tahun 1998, Dr. Galdikas menginisiasi kawasan tersebut sebagai kawasan konservasi untuk pelepasliaran orangutan. SM Lamandau memiliki luasan 56.584 ha dengan luasan daerah penyangga seluas 23.796 ha yang berstatus Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Konversi (HPK). Pengelolaan SM Lamandau berada di bawah Badan Konservasi Sumberdaya Alam Seksi Konservasi Wilayah II (BKSDA SKW II) Pangkalan Bun dan Orang Utan Foundation (OF). BKSDA SKW II dan OF bersama-sama mengelola Pos untuk mengawasi kegiatan di dalam kawasan SM Lamandau dan kamp yang berfungsi sebagai tempat pelepasliaran orangutan.

Selain diakses oleh perusahaan, SM Lamandau juga dimanfaatkan oleh masyarakat-masyarakat yang tinggal di desa penyangga sekitar SM Lamandau. Masyarakat yang tinggal di desa penyangga memanfaatkan SM Lamandau sebagai tempat mata pencaharian dan untuk kebutuhan sehari-hari. Masyarakat memanfaatkan hasil hutan non-kayu seperti tanaman *gembor* dan getah *pantung*<sup>1</sup>. Selain itu masyarakat juga berburu, mencari ikan sungai dan bertani di dalam SM Lamandau. Masyarakat juga memanfaatkan SM Lamandau sebagai sumber

<sup>1</sup> Nama lokal pohon Jelutung bagi masyarakat di Kalimantan Tengah

air tawar yang digunakan untuk minum dan kebutuhan sehari-hari.

Komunitas masyarakat umumnya memiliki keterkaitan erat dengan sumber daya hutan (Firdaus, 2012), sehingga setiap kali terjadi perubahan tata kelola hutan, komunitas akan merasakan dampaknya. Begitu juga dengan masyarakat yang memiliki mata pencaharian di dalam dan sekitar kawasan SM Lamandau terdampak dengan ditetapkannya SM Lamandau menjadi daerah konservasi. Masyarakat terdampak karena pembatasan akses aktivitas mata pencaharian mereka di dalam dan sekitar kawasan SM Lamandau. Pada waktu itu masyarakat Tanjung Putri sebagai salah satu desa penyangga dan banyak masyarakatnya yang bekerja kayu di SM Lamandau serta masyarakat yang memiliki mata pencaharian di dalam SM Lamandau yaitu para penyadap getah jelutung dan pencari ikan melakukan protes atas ditetapkannya SM Lamandau sebagai wilayah konservasi. Akhirnya, karena berbagai pertimbangan dan usaha untuk meredakan konflik antara masyarakat dan pengelola SM Lamandau, maka BKSDA SKW II Pangkalan Bun memberikan ijin terbatas melalui Surat Keterangan Berusaha (SKB) kepada para penyadap getah jelutung dan pencari ikan. Penyadap getah jelutung dan pencari ikan tetap dapat mengakses SM Lamandau, tetapi hanya di daerah penyangganya dengan mematuhi aturan-aturan konservasi dan memakai alat tradisional.

Setelah proses-proses aturan terkait SM Lamandau sudah ditetapkan, maka sebagai kawasan konservasi baru, diadakan sosialisasi dan pembinaan bagi masyarakat yang bekerja di daerah penyangga SM Lamandau yaitu para penyadap getah jelutung dan pencari ikan serta masyarakat yang tinggal di desa-desa penyangga SM Lamandau. Kegiatan sosialisasi dan pembinaan ini dilakukan melalui proyek kemitraan yang bernama KPEL (Kemitraan Pelestarian Ekosistem Lamandau) yang melibatkan OF, BKSDA SKW II Pangkalan Bun dan Yayasan. Kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan dalam proyek KPEL menekankan tentang kegiatan pelestarian ekosistem SM Lamandau dan mata pencaharian berkelanjutan yang dapat mendukung kegiatan konservasi di dalam dan daerah penyangga SM Lamandau.

Kelompok pengusul HKm Sepakat dibentuk atas inisiasi dari Yayasan. Pembentukan kelompok ini, bagi Yayasan bertujuan untuk menerapkan proyek REDD+ yang dikenal sebagai program CFC (*Community Forest Carbon*). Tetapi, karena konsep REDD+ kurang dimengerti oleh masyarakat, maka Yayasan menggunakan konsep mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat yang bekerja di daerah penyangga SM Lamandau yaitu dalam hal ini para penyadap getah jelutung dan pencari ikan di Sungai Buluh, sehingga pengajuan HKm masuk akal dan diperlukan bagi para penyadap getah jelutung dan pencari ikan Sungai Buluh. Akhirnya, pada 17 Juni 2011 diadakan pertemuan di Pos Jaga Sungai Buluh dan terbentuklah Kelompok pengusul HKm Sepakat yang beranggotakan para penyadap getah jelutung dan pencari ikan Sungai Buluh, termasuk pada waktu itu ketua kelompok pengusul HKm Sepakat yang bekerja sebagai penyadap getah jelutung Sungai Buluh. Selain pembentukan kelompok, diputuskan juga bahwa Desa Tanjung Putri dijadikan markas Kelompok pengusul HKm Sepakat karena desa ini berdekatan dengan Sungai Buluh dan merupakan desa tempat tinggal ketua Kelompok pengusul HKm Sepakat.

#### **PASANG SURUT KELOMPOK HKM SEPAKAT**

Seiring berjalannya waktu, HKm yang diajukan pada tahun 2012 oleh kelompok pengusul HKm Sepakat sampai penelitian penulis selesai pada tahun 2016 belum juga mendapatkan persetujuan dari Bupati Kotawaringin Barat. Perlahan-lahan, mulai tahun 2015, anggota-anggota kelompok pengusul HKm Sepakat keluar dari kelompok. Sebagian besar anggota kelompok pengusul HKm Sepakat yang keluar dari kelompok didominasi oleh para penyadap getah jelutung Sungai Buluh. Para penyadap getah jelutung Sungai Buluh keluar dari Kelompok pengusul HKm Sepakat dengan berbagai alasan yaitu, pola kerja, kondisi hutan, dan penghasilan yang rendah. Sehingga menyebabkan anggota kelompok pengusul HKm Sepakat mengalami penyusutan, khususnya yang bekerja sebagai penyadap getah jelutung di Sungai Buluh. Seperti Forum Masyarakat Peduli Kawasan Mbeliling (FPKM) yang tak berkembang sesuai ekspektasi (Firdaus, 2016), kelompok

pengusul HKm Sepakat juga tidak berkembang dengan baik.

Dalam kondisi menurunnya jumlah dan motivasi anggota yang berkegiatan di dalam Kelompok pengusul HKm Sepakat, ketua kelompok memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan Kelompok pengusul HKm Sepakat. Peran ketua kelompok dalam menjaga kelangsungan Kelompok pengusul HKm Sepakat yaitu dengan tetap mengadakan pertemuan rutin Kelompok pengusul HKm Sepakat setiap bulannya yang diadakan di rumah ketua Kelompok pengusul HKm Sepakat di Desa Tanjung Putri, sebagai usaha untuk memapankan sistem yang dibuat oleh Yayorin. Tetapi, hal ini tidak menunjukkan bahwa ketua kelompok sebagai individu yang tidak memiliki kehendak dan hanya menurut ketentuan dari Yayorin. Dalam hal ini, ketua kelompok juga memiliki kepentingan terhadap Yayorin karena dengan menjadi tenaga kontrak Yayorin pada waktu itu, ketua kelompok pengusul HKm Sepakat mendapatkan peluang untuk bekerja di luar desanya. Sehingga sebenarnya ketua kelompok memiliki kemampuan untuk melihat peluang antara kepentingannya, kepentingan Yayorin, dan kepentingan Kelompok pengusul HKm Sepakat. Kondisi ini membuat keduanya saling bergantung. Semua bentuk ketergantungan menawarkan sejumlah sumber daya yang memberikan kemampuan bagi para pihak untuk saling memengaruhi. Inilah yang disebut Giddens (2010) sebagai dialektika kendali/kontrol.

Selain perannya dalam memapankan sistem melalui pertemuan rutin kelompok pengusul HKm Sepakat yang diadakan setiap bulan, ketua kelompok juga berperan dalam menjaring orang-orang baru yang berasal dari desanya yaitu Tanjung Putri untuk masuk menjadi anggota kelompok pengusul HKm Sepakat walaupun sebagian besar masyarakat Tanjung Putri tidak ada yang bekerja di daerah penyangga SM Lamandau. Ketua Kelompok pengusul HKm Sepakat menjaring anggota-anggota baru yang berasal dari Desa Tanjung Putri karena desa ini merupakan markas dari kelompok pengusul HKm Sepakat dan merupakan tempat kelahiran ketua kelompok pengusul HKm Sepakat sehingga ketua kelompok merasa telah mengenal masyarakat Tanjung Putri yang membuat proses dalam menjaring

anggota baru menjadi lebih mudah. Selain itu, Desa Tanjung Putri berdekatan dengan SM Lamandau dan hanya dipisahkan oleh Sungai Arut sebagai batas langsung SM Lamandau di sebelah Utara.

Dalam menjaring anggota-anggota baru yang berasal dari Desa Tanjung Putri, ketua kelompok dan Yayorin mengemukakan bahwa dengan menjadi anggota Kelompok pengusul HKm Sepakat, mereka dapat mengakses dan mengelola daerah penyangga SM Lamandau, yaitu Sungai Buluh yang selama ini tidak dapat mereka akses. Dengan mengemukakan konsep akses, maka ketua kelompok dan Yayorin berharap dapat memotivasi masyarakat Desa Tanjung Putri untuk bergabung ke dalam Kelompok pengusul HKm Sepakat. Beberapa masyarakat Desa Tanjung Putri akhirnya bergabung dengan tujuan untuk memperoleh akses di daerah penyangga SM Lamandau, khususnya Sungai Buluh. Anggota-anggota baru Kelompok pengusul HKm Sepakat yang berasal dari Desa Tanjung Putri berpendapat bahwa mereka bisa mendapatkan sumberdaya baru yang akan meningkatkan pendapatan melalui akses pada daerah penyangga SM Lamandau. Akses ini bergantung kepada partisipasi mereka pada institusi yang berada di sekitar mereka, salah satunya yaitu Kelompok pengusul HKm Sepakat. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan (Berry, 1989) yang menyatakan bahwa para petani di Afrika berstrategi untuk meningkatkan pendapatan dan aset mereka dengan akses pada sumberdaya produktif yang ditentukan oleh partisipasi mereka pada beragam institusi sosial. Dalam hal ini, institusi sebagai penghubung para petani tersebut dengan sumberdaya produktif. Dengan masuknya anggota-anggota baru, maka Kelompok pengusul HKm Sepakat dapat bertahan dan terus berkegiatan.

Yayorin dan BKSDA SKW II Pangkalan Bun berperan dalam keberlangsungan Kelompok pengusul HKm Sepakat melalui program-program yang mereka berikan sebagai sumber daya yang digunakan oleh Kelompok pengusul HKm Sepakat untuk terus berkegiatan. Program-program Yayorin cenderung berubah untuk menyesuaikan kebutuhan anggota-anggota baru di dalam Kelompok pengusul HKm Sepakat dan lebih menekankan peningkatan ekonomi di samping tetap memperhatikan kegiatan-

kegiatan konservasi daerah penyangga SM Lamandau. Sedangkan program BKSDA SKW II Pangkalan Bun melalui Desa Konservasi lebih menonjolkan kegiatan-kegiatan yang pro lingkungan. Walau program-program tersebut disesuaikan dan dimodifikasi demi kebutuhan anggota Kelompok pengusul HKm Sepakat yang sudah berubah, tetapi kegiatan konservasi tetap dilakukan, salah satunya yaitu kegiatan reforestasi.

Penyesuaian dan pemodifikasian program-program di dalam Kelompok pengusul HKm Sepakat menunjukkan bahwa agen-agen baru di dalam Kelompok pengusul HKm Sepakat merupakan sarana reproduksi sistem karena dengan adanya anggota-anggota baru dapat mempengaruhi kegiatan-kegiatan Kelompok pengusul HKm Sepakat. Tetapi, anggota-anggota baru tersebut bukan hanya mempengaruhi sistem tetapi juga dibatasi oleh sistem tersebut yaitu membatasi perilaku agen yang berkaitan dengan konservasi pada daerah penyangga Sungai Buluh. Pada saat menjadi anggota Kelompok pengusul HKm Sepakat, anggota diwajibkan turut menjaga kelestarian SM Lamandau dan daerah penyangganya dan juga melakukan kegiatan reforestasi.

Selain menggambarkan kewajiban yang harus dijalankan anggota melalui kegiatan reforestasi. Reforestasi juga menggambarkan perwujudan kepengaturan yang dilakukan oleh Yayasan dan BKSDA SKW II Pangkalan Bun dalam mengarahkan perilaku masyarakat yang bekerja di Sungai Buluh dan masyarakat yang tinggal di desa penyangga SM Lamandau yaitu Desa Tanjung Putri. Yayasan dan BKSDA SKW II Pangkalan Bun melalui program-program ataupun kegiatan reforestasi bertujuan untuk mengarahkan perilaku individu yang mendukung konservasi. Salah satu kegiatan-kegiatan yang mengarahkan perilaku individu dalam mendukung konservasi, tercermin dalam kegiatan penanaman pohon jelutung yang dilakukan oleh Kelompok pengusul HKm Sepakat.

## KESIMPULAN

Tesis ini berfokus pada kelompok pengusul HKm Sepakat sebagai sebuah kelompok yang dinamis, yang merupakan satu dari total tujuh kelompok pengusul HKm yang difasilitasi oleh Yayasan yang masih

tetap bertahan hingga saat ini. Tesis ini menceritakan tentang dinamika internal keanggotaan kelompok pengusul HKm Sepakat dan dukungan pihak terkait yang dalam hal ini yaitu Yayasan (LSM) dan BKSDA SKW II Pangkalan Bun (pemerintah) dalam keberlangsungan kelompok pengusul HKm Sepakat. Dinamika keanggotaan merupakan unsur internal sedangkan peran Yayasan dan BKSDA SKW II Pangkalan Bun sebagai unsur eksternal. Keduanya berperan dan saling mempengaruhi dalam mempertahankan keberlangsungan kelompok pengusul HKm Sepakat.

Tesis ini tidak bertujuan untuk mencari prinsip-prinsip general dalam menentukan sebuah institusi yang fungsional atau dapat tetap bertahan dalam waktu yang lama melainkan sebuah usaha untuk melihat proses-proses yang terjadi pada institusi sehingga institusi tersebut dapat bertahan lama. Melalui penekanan terhadap “proses”, maka tesis ini memperlihatkan bahwa sebuah institusi selalu dikonstruksi dan dikonstruksi ulang oleh agen-agensya di dalam institusi tersebut. Selain dikonstruksi oleh agen-agensya, institusi juga mengkonstruksi agen-agen yang terlibat dalam institusi tersebut. Dengan demikian institusi tidak pernah dalam bentuknya yang *fixed* tetapi selalu berubah dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh agen-agensya dan mempengaruhi agen-agensya.

Dalam proses konstruksi institusi, penting untuk melihat tindakan agen-agen karena penulis dapat melihat bagaimana institusi bekerja dan diwujudkan melalui tindakan agen. Tesis ini menceritakan bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan agen-agen yaitu ketua kelompok, para anggota dan Yayasan dalam mempertahankan Kelompok pengusul HKm Sepakat. Para agen berstrategi untuk mempertahankan kelompok ini, tetapi lebih jauh juga untuk mempertahankan kepentingan mereka (Marleni, 2015). Tindakan-tindakan ini dapat dilihat misalnya, dalam tetap diadakannya pertemuan rutin setiap bulannya oleh ketua kelompok, lalu adanya praktik-praktik kompromi yang dilakukan Yayasan seperti pura-pura tak melihat adanya pelanggaran peraturan di dalam kelompok pengusul HKm Sepakat, dan mengkonstruksi data untuk menunjukkan “keberhasilan” Yayasan dalam melakukan pendampingan dalam Kelompok

pengusul HKm Sepakat dan lain-lain. Lebih jauh, bahkan agen-agen ini merubah tujuan kelompok demi menjangkau anggota-anggota baru agar kelompok pengusul HKm Sepakat dapat terus eksis.

Studi ini juga memperlihatkan bahwa salah satu hal yang penting dalam melihat tindakan agen yaitu makna dan motivasi agen dalam tindakan tersebut. Tesis ini membuktikan bahwa tindakan agen sebagian besar dilatari oleh motivasinya sehingga tindakannya dalam mempertahankan atau sebaliknya, keluar dari kelompok pengusul HKm Sepakat salah satunya karena kepentingannya sudah tidak terfasilitasi lagi oleh kelompok pengusul HKm Sepakat. Lebih jauh, tesis ini juga menceritakan bagaimana kepentingan-kepentingan tersebut berbeda-beda tetapi dapat saling jalin menjalin sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berkontribusi dalam keberlangsungan kelompok pengusul HKm Sepakat atau juga dapat saling bertentangan sehingga menimbulkan krisis di dalam Kelompok pengusul HKm Sepakat.

Berkaitan dengan kepentingan agen-agen di dalam Kelompok pengusul HKm Sepakat, tesis ini memperlihatkan bagaimana program-program yang diberikan oleh Yayasan dan BKSDA SKW II Pangkalan Bun sebagai perwujudan kepentingan mereka dalam hal kepengaturan. Yayasan dan BKSDA SKW II Pangkalan Bun berusaha mengarahkan perilaku anggota-anggota Kelompok pengusul HKm Sepakat agar mendukung konservasi yang terwujud dalam program-program yang menyertai kegiatan reforestasi di dalamnya.

Penulis berharap studi ini dapat berkontribusi dalam kajian mengenai proses-proses yang terjadi dalam mempertahankan keberlangsungan sebuah kelompok mulai dari pembentukan kelompok sampai dengan strategi-strategi yang dilakukan oleh para agen untuk mempertahankan keberlangsungan sebuah kelompok. Penulis juga berharap tulisan ini dapat berkontribusi dalam diskusi-diskusi terkait dengan proses-proses kepengaturan yang dilakukan oleh agen-agen, baik LSM ataupun Pemerintah dalam menerapkan program-program pembangunan yang sering kali diwujudkan dalam pembentukan sebuah kelompok.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahearn, L. M. (2000). Agency. *Journal of Linguistic Anthropology*, Vol.9, , 12–15.
- Ahearn, L. M. (2001). Language and Agency. *Annual Reviews*, Vol. 30, 109–137.
- Berry, S. (1989). Social Institution and Access to Resource. *Cambridge University Press on Behalf of the International African Institute*, Vol. 59, N, 41–55.
- Dean, M. (1999). *Governmentality: Power and Rule in Modern Society*. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications.
- Firdaus, F. (2012). Puar Cama Untuk Anak Cucu: Kearifan Lokal Untuk Sustainability Forest di Manggarai Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 1(1), 39–50.
- Firdaus, F. (2016). Evaluasi Proyek Pembangunan Sosial Pada Kelompok Masyarakat Kawasan Hutan Mbeliling, Kab. Manggarai Barat, NTT. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 5(1), 13–22.
- Giddens, A. (2003). *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*. Pasuruan: Penerbit Pedati.
- Giddens, A. (2010). *Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. (Maufur & Daryatno, Trans.). Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Have, P. ten. (2004). Understanding Qualitative Research and Ethnomethodology. In *Qualitative Methods in Social Research* (pp. 1–13). Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications.
- Li, T. M. (2007). Governmentality. *Canadian Anthropology Society*, Vol.49, no, 275–281.
- Li, T. M. (2012). *The Will To Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*. (H. Santoso & P. Semedi, Trans.). Jakarta:Indonesia: Marjin Kiri.
- Limberg, G., Iwan, R., Wollenberg, & Moeliono, M. (2006). Peluang dan Tantangan untuk Mengembangkan Hutan Kemasyarakatan :Pengalaman dari Malinau. CIFOR.
- Lubis, A. Y. (2014). *Postmodernisme: Teori dan Metode*. Jakarta:Indonesia: Rajawali Press.
- Marleni. (2015). Strategi Organisasi Formal Menjaga Ketahanan Institusi Lokal Di Pasar Raya Padang. *Jurnal Ilmu Sosial*

- Mamangan*, 4(135–143).
- McKee, K. (2009). Post-Foucauldian Governmentality: What Does It Offer Critical Social Policy Analysis? *University of Glasgow*, Vol.28, no, 465–486.
- Ortner, S. B. (2006). Power and Projects: Reflection on Agency. In *Anthropology and Social Theory: Culture, Power, and The Acting Subject*. Durham and London: Duke University Press.
- Purwoko, A. (2002). Kajian Akademis Hutan Kemasyarakatan. Fakultas Pertanian: Universitas Sumatera Utara.
- Rankin, K. N. (2003). Anthropologies and Geographies of Globalization. *Progress in Human Geography*, Vol. 25, n, 708–734.
- Sunarni. (2011). Pengembangan Hutan Kemasyarakatan di Rigis Jaya: Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera. In A. Santosa, S. Bintang, & Murhananto (Eds.), *Kehutanan Masyarakat: Pengalaman dari Lapangan*. Bogor, Indonesia: Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat.
- Swartz, M. J. (1969). Processual and Structural Approaches in Political Anthropology: A Commentary. *Taylor & Farncis, Ltd on Behalf of the Canadian Journal of African Studies*, Vol. 3 No.(Rural Africa), pp 53-59.